

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap etika birokrasi dalam pelayanan publik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Persamaan (equality), penerapan etika dalam pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo dari indikator kesamaan hak masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya sikap nepotisme pegawai terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tanggung jawab (responsibility), pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo pada indikator Tanggungjawab sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari waktu pelayanan dalam penyelesaian berkas. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada sebagian pegawai yang belum bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya karena masih terdapat pegawai yang terlihat cuek dalam memberikan pelayanan. Hal ini tentunya bertentangan dengan peraturan Bupati Manggarai Barat bahwasanya setiap pegawai memiliki tanggung jawab masing-masing.

- c. Kesetiaan (*loyalty*), pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo pada indikator kesetiaan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan waktu. Namun masih ada pegawai yang tidak taat pada aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pegawai yang melakukan tindakan nepotisme. Tentunya hal ini tidak selaras dengan peraturan yang ada.

## **B. Saran**

- a. Pada indikator persamaan masih perlu di tingkatkan lagi dalam hal pengawasan dan memberikan pembinaan kepada pegawai agar tidak terjadi tindakan nepotisme pada pelayanan publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo.
- b. Penerapan etika birokrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Labuan Bajo perlu ditingkatkan dengan jalan memberikan pembinaan tentang pentingnya pemahaman dan penanaman prinsip-prinsip etika dalam setiap diri aparat birokrasi seperti pemahaman terhadap pentingnya kode etika pelayanan, kejujuran dalam pemberian pelayanan, tanggung jawab etika dalam pelayanan, disiplin dalam melaksanakan tugas, serta tidak melakukan nepotisme terhadap masyarakat pengguna jasa dalam proses pelayanan.
- c. Aparat birokrasi perlu meningkatkan sopan dan keramahannya dalam menjalankan fungsinya dapat mengetahui perbuatan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan atau dihindari. Aparat harus meningkatkan mekanisme

pengawasan yang belum berjalan dengan baik perlu ditingkatkan, baik pengawasan dari dalam organisasi yang dilakukan secara timbal balik antara atasan dan bawahan maupun dari luar organisasi yang dilakukan oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 2007. *Etika*. Pt Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Dwiyanto, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta; Pusat studi  
kependudukan dan kebijakan (PPSK) UGM
- Darwin. 1999. *Tata Pemerintahan menuju politik Orde Baru*. Jakarta; Rineke Cipta
- Sadhana Kridawati. 2010. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Citra Malang. Malang
- Hasanah, Dt.Maaani. 2010. *Etika Pelayanan Publik*,vol 1.1X, No 1
- Hasana, D.I. (2019). *Moral dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. JISIPOL/ Jurnal  
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Musri dan Rizki Afri Mulia. 2022. *Etika Administrasi Publik*. Eureka Media Aksara. Jawa  
Tengah
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan  
Publik.
- Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Tentang Etika Penyelenggara Negara
- Zega Yamola, 2018. *Analisis Penerapan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Jurnal  
Ekonomi dan Ekonomi Syariah
- Lele Gabriel, 2008. *Memahami Etika Birokrasi Publik; Sebuah Diagnosis Institusional*. Jurnal  
Kebijkaan dan Manajemen PNS

- Mashur Bisri dan Bramantyo Asmoro. 2019. *Etika Pelayanan Publik di Indonesia*. Jurnal of Governance Innovation
- Suaib Muhammad, 2018. *Etika Birokrasi (Studi Pelayanan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sorong)* . Jurnal Noken 3 (2)
- Sundry Rini, 2013. *Pelaksanaan Etika Birokrasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia*. Jurnal Scientica
- Suhardi. 2012. *Penerapan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros*
- Fitri, 2020. *Etika Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone*
- Ali Nur, 2022. *Penerapan Etika Birokrasi Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkep*
- Agustina Sugi. 2016. *Analisis Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi Pada Kantor Camat Kecamatan Medan Helvetia)*
- Sugiyono dan R&d. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung;Alfabeta
- Sugiyono dan R&d. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung;Alfabeta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- Moleong. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Jakarta; Remaja
- Pananrangi, A.R &SH,M.P. 2017. *Etika Birokrat (vol.1)*. SAH MEDIA